JEMSI: Jurnal Ekonomi Manajemen Sistem Informasi
E-ISSN: 2686-5238
P-ISSN: 2686-4916
https://dinastirev.org/JEMSI dinasti.info@gmail.com +62 811 7404 455

DOI: https://doi.org/10.38035/jemsi.v7i6
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Received: 22 Mei 2026 | **Revised:** 6 Juli 2026 | **Accepted:** 9 Juli 2026

Digital *Governance* dalam Pengembangan Kompetensi Pendidik: Analisis Implementasi Aplikasi SIPALAWA di Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat

Syarif Hendriana[1], Iwan Kurniawan Subagja[2], Azis Hakim[3]
[1]Universitas Krisnadwipayana, Jakarta, Indonesia, syarifhendriana01@gmail.com
[2]Universitas Krisnadwipayana, Jakarta, Indonesia, iwankurniawan@unkris.ac.id
[3]Universitas Krisnadwipayana, Jakarta, Indonesia, dr_azishakim@yahoo.co.id

Corresponding Author: syarifhendriana01@gmail.com[1]

Abstract: *Digital transformation in the education sector has encouraged public institutions to adopt digital technologies to improve the governance of teacher professional development programs. One of the initiatives developed by the West Java Provincial Education Office is the Sistem Informasi Pelajar Pancawaluya (SIPALAWA), a digital platform designed to support the implementation of In-House Training (IHT) Pancawaluya through the integration of registration, scheduling, learning materials, reporting, and quality assurance processes. This study aims to analyze the implementation of SIPALAWA as a digital governance instrument for teacher competency development within the West Java Provincial Education Office. A quantitative descriptive approach was employed in this study. Data were collected through questionnaires distributed to 257 respondents, consisting of 173 facilitators and 84 school-level users. The data were analyzed using descriptive statistics, including frequencies, percentages, and mean scores. The findings indicate that SIPALAWA received highly positive evaluations from both respondent groups. Facilitators reported an overall mean score of 4.67, while school-level users reported a mean score of 4.39, both categorized as very good. Respondents perceived that SIPALAWA facilitated task implementation, activity scheduling, reporting processes, and the quality assurance of IHT Pancawaluya activities. Furthermore, most facilitators reported that the application did not increase their workload. The findings suggest that SIPALAWA contributes to enhancing service effectiveness, administrative efficiency, reporting accountability, and data management in teacher competency development programs. Therefore, SIPALAWA can be considered a digital governance initiative that supports the transformation of teacher professional development governance within the West Java Provincial Education Office.*

Keyword: *Digital Governance, Digital Transformation, Teacher Competency Development, SIPALAWA, In-House Training.*

Abstrak: Transformasi digital di sektor pendidikan telah mendorong lembaga publik untuk mengadopsi teknologi digital guna meningkatkan tata kelola program pengembangan

profesional guru. Salah satu inisiatif yang dikembangkan oleh Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat adalah Sistem Informasi Pelajar Pancawaluya (SIPALAWA), sebuah platform digital yang dirancang untuk mendukung pelaksanaan *_In-House Training_* (IHT) Pancawaluya melalui integrasi proses pendaftaran, penjadwalan, materi pembelajaran, pelaporan, dan penjaminan mutu. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi SIPALAWA sebagai instrumen tata kelola digital bagi pengembangan kompetensi guru di lingkungan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat. Pendekatan deskriptif kuantitatif digunakan dalam penelitian ini. Data dikumpulkan melalui kuesioner yang disebarkan kepada 257 responden, yang terdiri dari 173 fasilitator dan 84 pengguna di tingkat sekolah. Data dianalisis menggunakan statistik deskriptif, meliputi frekuensi, persentase, dan skor rata-rata. Hasil penelitian menunjukkan bahwa SIPALAWA mendapatkan penilaian yang sangat positif dari kedua kelompok responden. Fasilitator melaporkan skor rata-rata keseluruhan sebesar 4,67, sedangkan pengguna di tingkat sekolah melaporkan skor rata-rata 4,39; keduanya dikategorikan sangat baik. Responden menilai bahwa SIPALAWA memfasilitasi pelaksanaan tugas, penjadwalan kegiatan, proses pelaporan, serta penjaminan mutu kegiatan IHT Pancawaluya. Selain itu, sebagian besar fasilitator melaporkan bahwa aplikasi tersebut tidak menambah beban kerja mereka. Temuan ini mengindikasikan bahwa SIPALAWA berkontribusi dalam meningkatkan efektivitas layanan, efisiensi administrasi, akuntabilitas pelaporan, dan pengelolaan data dalam program pengembangan kompetensi guru. Oleh karena itu, SIPALAWA dapat dianggap sebagai inisiatif tata kelola digital yang mendukung transformasi tata kelola pengembangan profesional guru di Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat.

Kata Kunci: Tata Kelola Digital, Transformasi Digital, Pengembangan Kompetensi Guru, SIPALAWA, Pelatihan Internal.

PENDAHULUAN

Pengembangan sumber daya manusia. Dalam konteks pendidikan, transformasi digital tidak hanya ditujukan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran, tetapi juga untuk memperkuat tata kelola program pendidikan secara lebih efektif dan terintegrasi. OECD (2023) dan UNESCO (2023) menegaskan bahwa transformasi digital pendidikan memerlukan integrasi teknologi, tata kelola, dan kapasitas sumber daya manusia untuk meningkatkan kualitas layanan pendidikan. Pemerintah Indonesia melalui berbagai kebijakan pendidikan terus mendorong pemanfaatan teknologi digital sebagai bagian dari upaya peningkatan mutu pendidikan nasional. Dengan demikian, digitalisasi menjadi salah satu instrumen penting dalam mendukung pelaksanaan berbagai program pendidikan secara lebih efektif dan efisien.

Salah satu faktor yang menentukan keberhasilan penyelenggaraan pendidikan adalah kualitas kompetensi pendidik. Pendidik memiliki peran strategis dalam menciptakan proses pembelajaran yang berkualitas sehingga kompetensinya perlu ditingkatkan secara berkelanjutan. Upaya peningkatan kompetensi pendidik dilakukan melalui berbagai program pengembangan profesional, seperti pendidikan dan pelatihan, lokakarya, komunitas belajar, dan kegiatan pengembangan keprofesian berkelanjutan. Namun demikian, pelaksanaan program pengembangan kompetensi pendidik sering menghadapi berbagai kendala, antara lain proses administrasi yang kompleks, koordinasi kegiatan yang belum optimal, dokumentasi yang belum terintegrasi, serta keterbatasan dalam pelaksanaan *monitoring* dan evaluasi program. Kondisi tersebut menunjukkan perlunya inovasi tata kelola yang mampu mendukung pengelolaan program pengembangan kompetensi pendidik secara lebih efektif dan akuntabel (Mulyasa, 2022).

Sebagai upaya meningkatkan kualitas tata kelola program pengembangan kompetensi pendidik, Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat mengembangkan Sistem Informasi Pelajar

Pancawaluya (SIPALAWA). Aplikasi ini digunakan sebagai platform digital untuk mendukung penyelenggaraan *In House Training* (IHT) Pancawaluya yang menjadi bagian dari program penguatan kompetensi pendidik. SIPALAWA mengintegrasikan berbagai layanan dalam satu sistem, mulai dari penjadwalan kegiatan, penyediaan bahan ajar dan bahan tayang, panduan pelaksanaan IHT, moderasi kegiatan, simulasi penilaian, pelaporan pelaksanaan kegiatan, hingga penilaian narasumber. Integrasi layanan tersebut memungkinkan proses pengelolaan kegiatan dilakukan secara lebih sistematis, terdokumentasi, dan mudah diakses oleh seluruh pihak yang terlibat. Kehadiran SIPALAWA menjadi salah satu bentuk implementasi transformasi digital dalam pengelolaan program pengembangan kompetensi pendidik di lingkungan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat.

Dalam perspektif *digital governance*, SIPALAWA dapat dipandang sebagai instrumen tata kelola digital yang mendukung efektivitas pelaksanaan program pengembangan kompetensi pendidik. Melalui sistem yang terintegrasi, berbagai proses administrasi dan pelaporan dapat dilakukan secara lebih cepat dan efisien dibandingkan dengan mekanisme konvensional. Selain itu, penggunaan platform digital memungkinkan tersedianya data yang lebih akurat untuk mendukung *monitoring* dan evaluasi kegiatan. Pemanfaatan teknologi digital juga dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan program karena seluruh proses terdokumentasi dalam sistem. Dengan demikian, implementasi SIPALAWA menjadi menarik untuk dikaji sebagai bagian dari praktik *digital governance* dalam sektor pendidikan.

Meskipun berbagai penelitian telah membahas transformasi digital dalam pendidikan, sebagian besar penelitian masih berfokus pada penggunaan teknologi dalam pembelajaran atau pengelolaan administrasi sekolah. Penelitian yang mengkaji implementasi platform digital untuk mendukung tata kelola program pengembangan kompetensi pendidik masih relatif terbatas, khususnya pada konteks pemerintah daerah. Selain itu, masih diperlukan bukti empiris mengenai efektivitas pemanfaatan sistem digital dalam mendukung pelaksanaan program pengembangan kompetensi pendidik. Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi aplikasi SIPALAWA sebagai instrumen *digital governance* dalam pengembangan kompetensi pendidik di lingkungan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan tata kelola digital dalam sektor pendidikan sekaligus menjadi masukan bagi penguatan kebijakan transformasi digital di lingkungan pemerintahan daerah.

Digital governance merupakan konsep tata kelola yang memanfaatkan teknologi digital untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan. Konsep ini berkembang dari *e-government* yang pada awalnya berfokus pada digitalisasi layanan administrasi publik. *Digital governance* tidak hanya berkaitan dengan penggunaan teknologi informasi dalam pelayanan publik, tetapi juga mencakup transformasi proses kerja organisasi, pengelolaan data, pengambilan keputusan, dan penyelenggaraan kebijakan berbasis teknologi digital (Heeks, 2006). Transformasi digital juga mendorong perubahan budaya organisasi dan penciptaan nilai publik melalui pemanfaatan teknologi secara strategis (Mergel et al., 2019). Janowski (2015) menjelaskan bahwa *digital governance* merupakan fase perkembangan pemerintahan digital yang menempatkan teknologi sebagai bagian integral dari tata kelola sektor publik. OECD (2024) menegaskan bahwa pemerintahan digital modern harus dibangun melalui integrasi teknologi, data, organisasi, dan sumber daya manusia dalam satu sistem yang mampu menghasilkan layanan publik yang berpusat pada pengguna dan berbasis data. Penerapan *digital governance* telah berkembang pada berbagai sektor pelayanan publik, termasuk sektor pendidikan. Pemanfaatan teknologi digital dalam pendidikan tidak hanya digunakan untuk mendukung proses pembelajaran, tetapi juga untuk meningkatkan kualitas tata kelola program pendidikan. Sistem informasi memungkinkan proses perencanaan, pelaksanaan, *monitoring*, evaluasi, dan pelaporan program pendidikan

dilakukan secara lebih efektif dan terdokumentasi. OECD (2023) menyebutkan bahwa transformasi digital pendidikan memerlukan dukungan tata kelola yang mampu mengintegrasikan teknologi, data, kebijakan, dan kapasitas sumber daya manusia. Dalam konteks tersebut, *digital governance* menjadi landasan dalam pengembangan sistem digital yang mendukung pengelolaan program pendidikan secara berkelanjutan.

Pengembangan kompetensi pendidik merupakan salah satu aspek penting dalam peningkatan mutu pendidikan. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen menjelaskan bahwa guru harus memiliki kompetensi pedagogik, profesional, sosial, dan kepribadian yang dikembangkan secara berkelanjutan (Republik Indonesia, 2005). Pengembangan kompetensi dilakukan melalui berbagai program pendidikan dan pelatihan, lokakarya, komunitas belajar, dan kegiatan pengembangan keprofesian lainnya. Mulyasa (2022) menjelaskan bahwa pengembangan kompetensi guru bertujuan meningkatkan kemampuan profesional guru dalam menghadapi perubahan kurikulum, perkembangan teknologi, dan kebutuhan peserta didik. Keberhasilan program pengembangan kompetensi tidak hanya ditentukan oleh kualitas materi pelatihan, tetapi juga oleh sistem tata kelola yang mendukung pelaksanaan program secara efektif.

Salah satu bentuk pengembangan kompetensi yang dilaksanakan di lingkungan sekolah adalah *In House Training* (IHT). Program ini dirancang untuk meningkatkan kapasitas pendidik melalui kegiatan pelatihan yang diselenggarakan sesuai kebutuhan satuan pendidikan. Pelaksanaan IHT melibatkan berbagai tahapan mulai dari perencanaan, penjadwalan, penyediaan materi, pelaksanaan kegiatan, pelaporan, hingga evaluasi hasil kegiatan. Kompleksitas proses tersebut menuntut adanya sistem yang mampu mendukung pengelolaan kegiatan secara terintegrasi. Pemanfaatan teknologi digital menjadi salah satu alternatif untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan program pengembangan kompetensi pendidik.

Penerimaan pengguna terhadap teknologi dapat dijelaskan melalui *Technology Acceptance Model* (TAM) yang dikembangkan oleh Davis (1989). Model ini menjelaskan bahwa penggunaan teknologi dipengaruhi oleh dua konstruk utama, yaitu *perceived usefulness dan perceived ease of use*. *Perceived usefulness* menunjukkan keyakinan pengguna bahwa teknologi dapat meningkatkan kinerja, sedangkan *perceived ease of use* menunjukkan tingkat kemudahan penggunaan teknologi. Semakin tinggi manfaat dan kemudahan yang dirasakan pengguna, semakin tinggi pula tingkat penerimaan terhadap teknologi tersebut. Dalam penelitian ini, konsep *perceived usefulness* tercermin pada kemampuan SIPALAWA dalam membantu pelaksanaan kegiatan IHT, mendukung pelaporan, dan membantu penjaminan mutu program. Sementara itu, *perceived ease of use* tercermin pada kemudahan pengguna dalam mengoperasikan aplikasi.

Selain TAM, penelitian ini juga menggunakan *Unified Theory of Acceptance and Use of Technology* (UTAUT) yang dikembangkan oleh Venkatesh et al. (2003). Teori ini menjelaskan bahwa penggunaan teknologi dipengaruhi oleh *performance expectancy, effort expectancy, social influence*, dan *facilitating conditions. Performance expectancy* berkaitan dengan keyakinan bahwa teknologi dapat meningkatkan kinerja pengguna. *Effort expectancy* menunjukkan tingkat kemudahan penggunaan teknologi. *Social influence* menggambarkan pengaruh lingkungan sosial terhadap penggunaan teknologi, sedangkan *facilitating conditions* berkaitan dengan dukungan organisasi dan ketersediaan sumber daya yang memungkinkan teknologi digunakan secara optimal. UTAUT memberikan penjelasan bahwa keberhasilan implementasi teknologi tidak hanya dipengaruhi oleh karakteristik sistem, tetapi juga oleh dukungan lingkungan organisasi.

Penelitian ini menempatkan SIPALAWA sebagai instrumen *digital governance* dalam pengelolaan program *In House Training* (IHT) Pancawaluya di lingkungan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat. Aplikasi ini digunakan untuk mendukung penjadwalan kegiatan,

penyediaan bahan ajar dan bahan tayang, panduan pelaksanaan IHT, moderasi kegiatan, simulasi penilaian, pelaporan pelaksanaan kegiatan, dan penilaian narasumber. Implementasi SIPALAWA dianalisis melalui persepsi pengguna terhadap kemudahan penggunaan aplikasi, kemudahan penjadwalan, dukungan terhadap pelaksanaan tugas, kemudahan pelaporan, kontribusi terhadap penjaminan mutu, dan efisiensi beban kerja. Analisis tersebut digunakan untuk menjelaskan kontribusi SIPALAWA dalam mendukung efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas pengelolaan program pengembangan kompetensi pendidik.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode deskriptif untuk menganalisis implementasi aplikasi SIPALAWA sebagai instrumen *digital governance* dalam pengembangan kompetensi pendidik di lingkungan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat. Pendekatan kuantitatif digunakan untuk memperoleh gambaran empiris mengenai persepsi pengguna terhadap pemanfaatan aplikasi SIPALAWA dalam mendukung penyelenggaraan *In House Training* (IHT) Pancawaluya. Populasi penelitian adalah seluruh pengguna aplikasi SIPALAWA yang terlibat dalam pelaksanaan IHT Pancawaluya, dengan jumlah responden sebanyak 84 orang PIC IHT Pancawaluya di Sekolah dan 173 orang narasumber IHT Pancawaluya. Teknik pengambilan sampel menggunakan total sampling, sehingga seluruh responden yang mengisi instrumen penelitian dijadikan sebagai sumber data penelitian.

Pengumpulan data dilakukan menggunakan angket dengan skala Likert lima tingkat, mulai dari skor 1 (sangat tidak setuju) sampai dengan skor 5 (sangat setuju). Instrumen penelitian terdiri atas enam indikator yang meliputi kemudahan penggunaan aplikasi, kemudahan penjadwalan kegiatan, dukungan terhadap pelaksanaan tugas narasumber, kemudahan pelaporan, kontribusi terhadap penjaminan mutu pelaksanaan IHT, dan persepsi terhadap beban kerja pengguna. Data dianalisis menggunakan statistik deskriptif melalui perhitungan frekuensi, persentase, dan nilai rata-rata (mean) untuk menggambarkan tingkat penerimaan dan pemanfaatan aplikasi SIPALAWA. Hasil analisis kemudian diinterpretasikan berdasarkan kategori penilaian dan dibahas dalam perspektif *digital governance, Technology Acceptance Model* (TAM), dan *Unified Theory of Acceptance and Use of Technology* (UTAUT) guna menjelaskan kontribusi aplikasi SIPALAWA terhadap efektivitas, efisiensi, akuntabilitas, dan kualitas tata kelola program pengembangan kompetensi pendidik.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian diperoleh dari dua kelompok responden, yaitu narasumber yang terlibat dalam pelaksanaan *In House Training* (IHT) Pancawaluya dan pengguna SIPALAWA di tingkat sekolah. Analisis dilakukan untuk mengetahui persepsi pengguna terhadap implementasi SIPALAWA sebagai instrumen *digital governance* dalam pengelolaan program pengembangan kompetensi pendidik.

Tabel 1. Persepsi Narasumber terhadap Implementasi SIPALAWA

Indikator	Mean
SIPALAWA memudahkan proses penjadwalan IHT Pancawaluya	4,84
SIPALAWA mudah digunakan untuk kegiatan IHT Pancawaluya	4,82
SIPALAWA membantu pelaksanaan tugas narasumber	4,88
SIPALAWA mudah digunakan untuk proses pelaporan	4,81
SIPALAWA mendukung penjaminan mutu pelaksanaan IHT	4,59
SIPALAWA menambah beban tugas narasumber*	1,89
Rata-rata keseluruhan	4,67

*Keterangan: item negatif.

Tabel 2. Persepsi Pengguna Sekolah terhadap Implementasi SIPALAWA

Indikator	Mean
SIPALAWA memudahkan pendaftaran IHT Pancawaluya	4,33
SIPALAWA mudah digunakan untuk kegiatan IHT Pancawaluya	4,41
SIPALAWA mudah digunakan untuk pelaporan IHT Pancawaluya	4,51
SIPALAWA mendukung pelaksanaan program IHT Pancawaluya	4,42
SIPALAWA dibutuhkan dalam keberhasilan program IHT Pancawaluya	4,30
Rata-rata keseluruhan	4,39

Berdasarkan hasil analisis, kedua kelompok responden memberikan penilaian yang sangat positif terhadap implementasi SIPALAWA. Kelompok narasumber memberikan nilai rata-rata keseluruhan sebesar 4,67, sedangkan kelompok pengguna sekolah memberikan nilai rata-rata sebesar 4,39. Temuan tersebut menunjukkan bahwa SIPALAWA diterima dengan baik oleh berbagai pemangku kepentingan yang terlibat dalam pelaksanaan IHT Pancawaluya. Berdasarkan hasil penelitian, pengguna merasakan manfaat SIPALAWA terutama pada aspek penjadwalan, pelaporan, dan pengelolaan kegiatan. Temuan ini menunjukkan bahwa digitalisasi proses kerja melalui SIPALAWA membantu pelaksanaan IHT Pancawaluya menjadi lebih terorganisasi dibandingkan dengan mekanisme sebelumnya.

Pada kelompok narasumber, indikator dengan nilai tertinggi adalah kemampuan SIPALAWA dalam membantu pelaksanaan tugas narasumber dengan nilai rata-rata 4,88. Hasil ini menunjukkan bahwa aplikasi mampu mendukung berbagai kebutuhan pelaksanaan IHT, mulai dari pengelolaan kegiatan, akses informasi, hingga pelaporan program. Selain itu, indikator kemudahan penjadwalan kegiatan (4,84), kemudahan penggunaan aplikasi (4,82), dan kemudahan pelaporan (4,81) juga memperoleh penilaian yang sangat tinggi. Hasil ini menunjukkan bahwa pengguna tidak mengalami kesulitan berarti dalam memanfaatkan fitur-fitur yang tersedia pada SIPALAWA. Kemudahan tersebut menjadi salah satu faktor yang mendukung kelancaran pelaksanaan IHT Pancawaluya. Dalam perspektif *Technology Acceptance Model* (TAM), tingginya persepsi kemanfaatan dan kemudahan penggunaan menjadi faktor penting yang mendorong penerimaan teknologi oleh pengguna (Davis, 1989).

Pada kelompok pengguna sekolah, indikator dengan nilai tertinggi adalah kemudahan penggunaan SIPALAWA untuk proses pelaporan IHT Pancawaluya dengan nilai rata-rata 4,51. Hasil tersebut menunjukkan bahwa sistem pelaporan yang terintegrasi menjadi salah satu manfaat utama yang dirasakan oleh pengguna di tingkat sekolah. Indikator dukungan terhadap pelaksanaan program IHT (4,42), kemudahan penggunaan aplikasi (4,41), dan kemudahan pendaftaran kegiatan (4,33) juga memperoleh penilaian yang sangat baik. Temuan ini menunjukkan bahwa SIPALAWA tidak hanya berfungsi sebagai sarana administrasi digital, tetapi juga mendukung pelaksanaan program pengembangan kompetensi pendidik secara lebih sistematis dan terdokumentasi.

Perbedaan nilai rata-rata antara kelompok narasumber dan pengguna sekolah menunjukkan bahwa manfaat aplikasi lebih banyak dirasakan oleh pihak yang terlibat langsung dalam pengelolaan dan pelaksanaan kegiatan IHT. Meskipun demikian, kedua kelompok memberikan penilaian pada kategori sangat baik, sehingga dapat disimpulkan bahwa SIPALAWA telah diterima secara luas oleh pengguna. Temuan ini sejalan dengan konsep *performance expectancy* dalam *Unified Theory of Acceptance and Use of Technology* (UTAUT) yang menjelaskan bahwa teknologi akan lebih mudah diterima apabila mampu membantu pengguna meningkatkan kinerja dan produktivitas kerja (Venkatesh et al., 2003).

Dari perspektif *digital governance*, hasil penelitian menunjukkan bahwa SIPALAWA telah mendukung prinsip *user-centered service* melalui kemudahan penggunaan aplikasi, *efficiency and effectiveness* melalui dukungan terhadap pelaksanaan kegiatan dan pelaporan, serta *data-driven governance* melalui penyediaan informasi yang mendukung *monitoring* dan penjaminan mutu program. Integrasi berbagai layanan dalam satu platform juga memperkuat transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan program karena seluruh proses terdokumentasi

secara digital. Temuan ini memperlihatkan bahwa SIPALAWA tidak hanya berfungsi sebagai sarana digitalisasi administrasi, tetapi juga sebagai instrumen tata kelola digital yang mendukung pengembangan kompetensi pendidik di lingkungan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat.

KESIMPULAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Sistem Informasi Pelajar Pancawaluya (SIPALAWA) memperoleh respons yang sangat positif dari berbagai kelompok pengguna yang terlibat dalam pelaksanaan *In House Training* (IHT) Pancawaluya di lingkungan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat. Kelompok narasumber memberikan nilai rata-rata sebesar 4,67, sedangkan kelompok pengguna sekolah memberikan nilai rata-rata sebesar 4,39. Hasil tersebut menunjukkan bahwa SIPALAWA diterima dengan baik dan dinilai mampu mendukung pelaksanaan program pengembangan kompetensi pendidik secara efektif. Manfaat yang paling dirasakan pengguna meliputi kemudahan penggunaan aplikasi, kemudahan penjadwalan dan pendaftaran kegiatan, dukungan terhadap pelaksanaan tugas, serta kemudahan dalam proses pelaporan kegiatan.

Temuan penelitian juga menunjukkan bahwa SIPALAWA berkontribusi terhadap peningkatan kualitas tata kelola program pengembangan kompetensi pendidik melalui penguatan aspek efektivitas layanan, efisiensi administrasi, akuntabilitas pelaporan, dan dukungan terhadap penjaminan mutu kegiatan. Integrasi berbagai layanan dalam satu platform memungkinkan proses pengelolaan IHT Pancawaluya dilakukan secara lebih sistematis, terdokumentasi, dan mudah dipantau. Dari perspektif *digital governance*, SIPALAWA telah merepresentasikan pemanfaatan teknologi digital yang tidak hanya mendukung digitalisasi administrasi, tetapi juga memperkuat tata kelola program pengembangan kompetensi pendidik melalui pendekatan yang lebih terintegrasi dan berbasis data.

Meskipun demikian, penelitian ini masih terbatas pada analisis deskriptif terhadap persepsi pengguna sehingga belum mampu menjelaskan secara mendalam faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan implementasi SIPALAWA. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya dapat mengembangkan pendekatan yang lebih komprehensif melalui analisis hubungan antarvariabel atau metode campuran (*mixed methods*) untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai implementasi *digital governance* dalam pengembangan kompetensi pendidik.

REFERENSI

Davis, F. D. (1989). *Perceived usefulness, perceived ease of use, and user acceptance of information technology*. *MIS Quarterly, 13*(3), 319–340. https://doi.org/10.2307/249008

Heeks, R. (2006). *Implementing and managing e-government: An international text*. SAGE Publications.

Indrajit, R. E. (2006). *Electronic government: Strategi pembangunan dan pengembangan sistem pelayanan publik berbasis teknologi digital*. Andi Offset.

Janowski, T. (2015). *Digital government evolution: From transformation to contextualization*. *Government Information Quarterly, 32*(3), 221–236. https://doi.org/10.1016/j.giq.2015.07.001

Mergel, I., Edelmann, N., & Haug, N. (2019). *Defining digital transformation: Results from expert interviews. Government Information Quarterly, 36*(4), 101385. https://doi.org/10.1016/j.giq.2019.06.002

Mulyasa, E. (2022). Menjadi guru penggerak merdeka belajar. Bumi Aksara.

Organisation for Economic Co-operation and Development. (2023). *OECD digital education outlook 2023: Towards an effective digital education ecosystem*. *OECD Publishing*. https://doi.org/10.1787/c74f03de-en

Organisation for Economic Co-operation and Development. (2024). *Digital government policy framework*. OECD Publishing.

Republik Indonesia. (2005). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. Sekretariat Negara Republik Indonesia.

Sedarmayanti. (2018). Reformasi administrasi publik, reformasi birokrasi, dan kepemimpinan masa depan. Refika Aditama.

UNESCO. (2023). *Global education monitoring report 2023: Technology in education: A tool on whose terms?* UNESCO Publishing.

Venkatesh, V., Morris, M. G., Davis, G. B., & Davis, F. D. (2003). *User acceptance of information technology: Toward a unified view. MIS Quarterly, 27*(3), 425–478. https://doi.org/10.2307/30036540.